



















semakin meningkat pula. Permasalahan ini disikapi oleh sekelompok nelayan di Desa Bangsring dengan mengadakan pertemuan antar nelayan. Kemudian pada tahun 2008, tepatnya hari minggu, 06 januari 2008 menghasilkan kesepakatan untuk mendirikan kelompok nelayan yang kemudian dinamakan kelompok nelayan ikan hias samudera bakti yang disingkat KNIH-SB yang mempunyai tujuan, usaha dan kepentingan yang sama. Setelah dibentuknya kelompok ini maka dibentuk pula pengurus kelompok yang diketuai oleh Ikhwan Arief sampai sekarang.<sup>8</sup>

Kelompok nelayan ini dalam perjalannya kemudian, sering melakukan kampanye anti potas dan anti perusakan lingkungan terhadap nelayan-nelayan. Hal ini diwujudkan dengan kerjasama KNIH-SB dengan Pemda Banyuwangi, yayasan Pelangi Indonesia dan Lembaga PILANG dalam program adaptasi perubahan iklim desa bangsring. Tindak lanjut dari kegiatan tersebut dengan membenuk area konservasi terumbu karang dengan zona ini seluas 1 Ha dan zona pendukung disekitar zona inti yang diawasi bersama masyarakat dengan dasar hukum PERDES (Peraturan Desa) No.2 tahun 2009 tentang Zona Perlindungan Bersama (ZPB) yang kemudian juga dikukuhkan dalam PERDA No.8 tahun 2012.

Semenjak terbentuknya KNIH-SB sampai sekarang, sudah berjalan dengan pesat, dibuktikan dengan bertambahnya anggota, tingkat kesadaran nelayan semakin tinggi dan juga telah dirasakan oleh masyarakat sekitar

---

<sup>8</sup> Febby Tamara Viyanda, *Rencana Strategi Kelompok Masyarakat Pengawas Samudra Bakti Di Desa Bangsring Kecamatan Wongsorejo Kabupaten Banyuwangi* (Skripsi tidak diterbitkan, Jurusan Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan dan Kelautan Universitas Brawijaya Malang, 2015), 38













### 3. Perhatian Pemerintah Daerah Dalam Inisiasi Pemulihan Ekosistem Laut Bangsring

Pemerintah yang efektif tidak harus berarti pemerintah yang kuat. Tentu saja, konsep pemerintahan yang kuat bisa saja diterima sejauh pemerintahan yang kuat itu tidak dipahami dalam pengertian negative menindas dan mematikan kekuatan-kekuatan sah yang demokratis, dengan akibat kekuasaan pemerintah diselewengkan tanpa terkendali demi kepentingan kelompok dengan mengorbankan kepentingan rakyat banyak. Pemerintahan yang kuat bisa diterima sejauh yang dimaksudkan disini adalah suatu pemerintahan yang tegar dan tahan terhadap berbagai tarik-menarik kepentingan sedemikian rupa sehingga kekuasaan pemerintah tidak bisa dipermainkan dan diselewengkan dari tujuan yang benar. Jadi kuat dalam arti mampu melawan berbagai politik kepentingan sempit yang bermaksud menyelewengkan kekuasaan pemerintah itu sendiri.

Sebenarnya dalam hal ini yang diperlukan adalah hubungan peran yang baik antara pelaku langsung dan tidak langsung atas pengelolaan lingkungan laut. Jika dua pelaku tersebut benar-benar bekerjasama dan membuat hubungan yang simbiotik kini dan masa depan atas pengelolaan lingkungan yang lestari, kerusakan kelautan akan dapat dicegah. LSM mempunyai peran yang penting, karena jelas kekuatan LSM adalah karakter moralnya yang kuat dan keinginan untuk mempengaruhi pelaku langsung atas kerusakan lingkungan. Kekuatan LSM dapat dibagi menjadi dua macam: 1. Ketika LSM mencari pengaruh politik melalui usaha untuk mempengaruhi kebijakan







kehidupan Desa Bangsring. Sehingga keadaan tersebut mampu merubah mindset masyarakat menjadi biosentrisme.

Walaupun awal pemulihan yang dilakukan oleh Ikhwan menggunakan biaya pribadi, namun hasil yang di dapat memberi perubahan bagi wajah lingkungannya. Sehingga lambat laun kegiatan pemulihan yang dilakukan oleh ikhwan dapat menarik perhatian pemerintah setempat untuk turut melestarikan dan menjaga lingkungan. Sehingga dari hal tersebut dapat memberikan pengaruh terhadap pembuat kebijakan untuk lebih memperhatikan lingkungan.

Politik lingkungan disini juga menganalisis peran institusi/ pihak-pihak yang berkepentingan dengan sumberdaya alam dan lingkungan. *Civil society* seperti organisasi bukan pemerintahan yang melakukan kampanye dan advokasi mempunyai pengaruh besar dan memainkan peran yang kuat dalam tata kelola sumberdaya alam dan lingkungan karena kegiatan mereka bisa mempengaruhi pembuatan kebijakan dan keputusan pemerintah untuk kepentingan lingkungan.

Terbukti dengan data di lapangan dimana *civil society* mempunyai pengaruh yang besar terhadap pengelolaan lingkungan yang akhirnya dapat mempengaruhi pembuatan kebijakan dan keputusan pemerintah melalui diberlakukannya Perdes tentang Zona Perlindungan Bersama (ZPB) di Desa Bangsring. Sehingga letak politik lingkungannya yaitu dimana masyarakat sipil dapat mempengaruhi pembuat kebijakan untuk lebih pro terhadap lingkungan.